

**KERJA SAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DOMESTIK PEREMPUAN
TAHUN 2022–2024**

ABSTRAK

Pasca pandemi pengiriman pekerja migran perempuan ke Malaysia meningkat signifikan di sektor domestik, namun diiringi lonjakan pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam penempatan dan perlindungan PMD perempuan tahun 2022–2024. Dengan menggunakan teori kerja sama dan konsep migrasi internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder. Data primer melalui wawancara semi-terstruktur dengan Direktorat Penempatan KP2MI, Direktorat Layanan Pengaduan dan Mediasi KP2MI, Komisioner Komnas Perempuan, Ketua Persatuan Buruh Migran Indonesia, serta Direktorat PWNI Kementerian Luar Negeri. Sedangkan data sekunder melalui studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa kerja sama 2022 menghasilkan kemajuan normatif melalui One Channel System, standar gaji, dan mekanisme Joint Working Group. Namun, masih ditemukan sejumlah hambatan, meliputi disparitas prioritas kebijakan domestik Malaysia, kurangnya persiapan calon PMD perempuan Indonesia, serta lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan di Indonesia. Akumulasi sebanyak 3.171 kasus pengaduan dari PMI perempuan sepanjang 2022–2024 menegaskan bahwa kesenjangan antara komitmen kerja sama dan perlindungan substantif di lapangan masih lebar.

Kata kunci: Kerja Sama, Pekerja Migran Perempuan, Sektor Domestik, Malaysia, Perlindungan

ABSTRACT

Post-pandemic, the deployment of female migrant workers to Malaysia has increased significantly in the domestic sector, but this has been accompanied by a surge in complaints. This study aims to discuss and analyze cooperation between Indonesia and Malaysia in the placement and protection of female migrant workers in 2022–2024. Using cooperation theory and the concept of international migration, the study employed descriptive qualitative methods with primary and secondary data. Primary data were collected through semi-structured interviews with the Directorate of KP2MI, the Directorate of Complaints and Mediation Services of the KP2MI, the Commissioner of Komnas Perempuan, the Chairperson of the Indonesian Migrant Workers Association, and the Directorate of Protection of Indonesian Citizens of the Ministry of Foreign Affairs. Secondary data were collected through literature studies. The findings indicate that the 2022 cooperation resulted in normative progress through the One Channel System, salary standards, and the Joint Working Group mechanism. However, several obstacles remain, including disparity in Malaysia's domestic policy priorities, insufficient preparation of prospective Indonesian female migrant workers, and weak coordination between levels of government in Indonesia. The accumulation of 3,171 complaints from female migrant workers between 2022 and 2024 confirms the wide gap between commitments to cooperation and substantive protection on the ground.

Keywords: Cooperation, Female Migrant Workers, Domestic Sector, Malaysia, Protection